

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Bandung, terkenal sebagai pusat kreativitas dan inovasi di Jawa Barat, memiliki peran penting dalam ekonomi regional melalui kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data yang dirilis oleh Open Data Jabar (2023), jumlah UMKM di Kota Bandung terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang kuat dan beragam. UMKM di kota ini bukan sekedar menjadi tulang punggung ekonomi lokal tetapi sebagai sumber inovasi dan penciptaan lapangan kerja (Portal Bandung, 2022).

Kota ini terkenal sebagai pusat pertumbuhan *startup* teknologi dan inovasi digital, UMKM berpotensi besar untuk memperluas kapasitas produksi, memperluas pasar, dan mempertahankan daya saing dalam ekonomi digital yang berkembang pesat. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi agar UMKM dapat sepenuhnya memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usahanya. Kendala tersebut antara lain terbatasnya infrastruktur yang belum memadai serta masalah aksesibilitas dan keterjangkauan teknologi (Sianipar & Soraya, 2024). Penanggulangan hambatan – hambatan ini akan membuka jalan bagi UMKM di Kota Bandung untuk tumbuh dan berkembang, menggunakan teknologi sebagai *leverage* utama. Berikut ini merupakan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM di Jawa Barat

No.	Nama Kabupaten Kota	Jumlah
1	Kabupaten Bogor	570.943
2	Kabupaten Sukabumi	409.507
3	Kabupaten Cianjur	381.810
4	Kabupaten Bandung	537.801
5	Kabupaten Garut	394.496
6	Kabupaten Tasikmalaya	286.300

No.	Nama Kabupaten Kota	Jumlah
7	Kabupaten Ciamis	212.697
8	Kabupaten Kuningan	144.445
9	Kabupaten Cirebon	384.544
10	Kabupaten Majalengka	238.762
11	Kabupaten Sumedang	176.898
12	Kabupaten Indramayu	290.833
13	Kabupaten Subang	258.457
14	Kabupaten Purwakarta	132.816
15	Kabupaten Karawang	355.623
16	Kabupaten Bekasi	351.720
17	Kabupaten Bandung Barat	237.919
18	Kabupaten Pangandaran	91.785
19	Kota Bogor	131.538
20	Kota Sukabumi	60.865
21	Kota Bandung	523.584
22	Kota Cirebon	61.234
23	Kota Bekasi	309.116
24	Kota Depok	247.207
25	Kota Cimahi	86.635
26	Kota Tasikmalaya	138.703
27	Kota Banjar	39.422
	JUMLAH	7.055.660

Sumber: Open Data Jabar (2023)

Berdasarkan survei yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (2024a) jumlah rekening penerima pinjaman aktif untuk kategori UMKM keseluruhan *peer-to-peer* di Indonesia adalah sebesar 4.576.649 untuk setiap entitasnya pada informasi terakhir di bulan Februari 2024. Sementara untuk jumlah penerima pinjaman dalam satuan akun di Jawa Barat adalah sebesar 1.380.558.

Dalam konteks pengembangan ekonomi digital di Jawa Barat, penggunaan sistem *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencerminkan adopsi yang luas di kalangan pengguna baru dan pedagang. Pada tahun 2023, Jawa Barat berkontribusi sebanyak 32,2% dari

total pengguna baru QRIS di Indonesia, dengan jumlah pengguna baru mencapai 350.284. Hal ini mencerminkan peningkatan aktivitas pembayaran non-tunai yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional. Lebih jauh, Jawa Barat juga mencatatkan peningkatan jumlah *merchant* baru yang menggunakan QRIS, dengan total mencapai 5.326.044 *merchant*, atau sekitar 21,34% dari total *merchant* baru di Indonesia. Peningkatan ini tidak hanya mendukung transaksi ekonomi yang lebih efisien tetapi juga menunjukkan dinamika pasar yang adaptif terhadap teknologi pembayaran *modern* (Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, 2023).

Data yang berasal dari Badan Pusat Statistika (2023) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah usaha *E-commerce* terbanyak di Indonesia yang diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jumlah usaha *E-commerce* di setiap provinsi dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Usaha *E-commerce* Terbagi atas Provinsi

No.	Nama Data	Nilai (satuan)
1	Jawa Barat	642.672
2	Jawa Timur	571.958
3	Jawa Tengah	541.072
4	DKI Jakarta	253.261
5	DI Yogyakarta	173.977
6	Banten	105.384
7	Bali	86.156
8	Sumatra Utara	74.672
9	Lampung	58.792
10	Sulawesi Selatan	51.682

Sumber: Badan Pusat Statistika (2023)

Meskipun data spesifik untuk Bandung tidak terpisah, total usaha *E-commerce* di Jawa Barat mencapai 642.672. Data menunjukkan bahwa Bandung, sebagai kota besar di Jawa Barat, berkontribusi signifikan dalam angka tersebut. Hal ini menunjukkan adopsi teknologi digital yang efektif dalam sektor bisnis lokal dan mengindikasikan tren pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh *E-commerce*, terutama di kota – kota besar seperti Bandung.

Dalam konteks penelitian ini, fokus pada objek penelitian UMKM di Kota Bandung sehingga dapat mengeksplorasi bagaimana *Peer-to-Peer (P2P) lending* dan QRIS dapat mempengaruhi kinerja UMKM melalui *E-commerce*. Dalam beberapa tahun terakhir, adopsi digital telah dipercepat, terutama dalam konteks *Peer-to-Peer (P2P) lending*, QRIS, dan *E-commerce* yang semuanya menawarkan potensi besar untuk mendukung UMKM.

1.2 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB). Di Kota Bandung, kinerja UMKM pada tahun 2020 mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor ini melalui indikator seperti pertumbuhan usaha, modal, dan penguatan kelembagaan (Dinas Koperasi UMKM, 2020). Namun, tantangan seperti keterbatasan akses modal, pasar, dan adopsi teknologi masih menjadi hambatan yang signifikan bagi UMKM untuk terus berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional (Usman et al., 2023). Penelitian Anantadjaya et al. (2023) juga mengungkapkan bahwa kinerja UMKM sering kali terhambat oleh keterbatasan modal, kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas, serta rendahnya adopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Keterbatasan ini menyulitkan UMKM untuk membiayai ekspansi bisnis atau berinvestasi dalam peralatan dan teknologi baru (Anantadjaya et al., 2023).

Hambatan yang dihadapi UMKM dalam mengakses pendanaan dari lembaga keuangan formal menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai hal yang sangat penting. Data Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sekitar 46,6 juta dari total 64 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses modal dari bank, yang mengindikasikan mayoritas UMKM masih kesulitan mendapatkan pembiayaan formal. Tantangan ini diperburuk dengan tingginya suku bunga yang dapat mengancam keberlanjutan usaha (Kementerian Keuangan RI Ditjen Perbendaharaan, 2022).

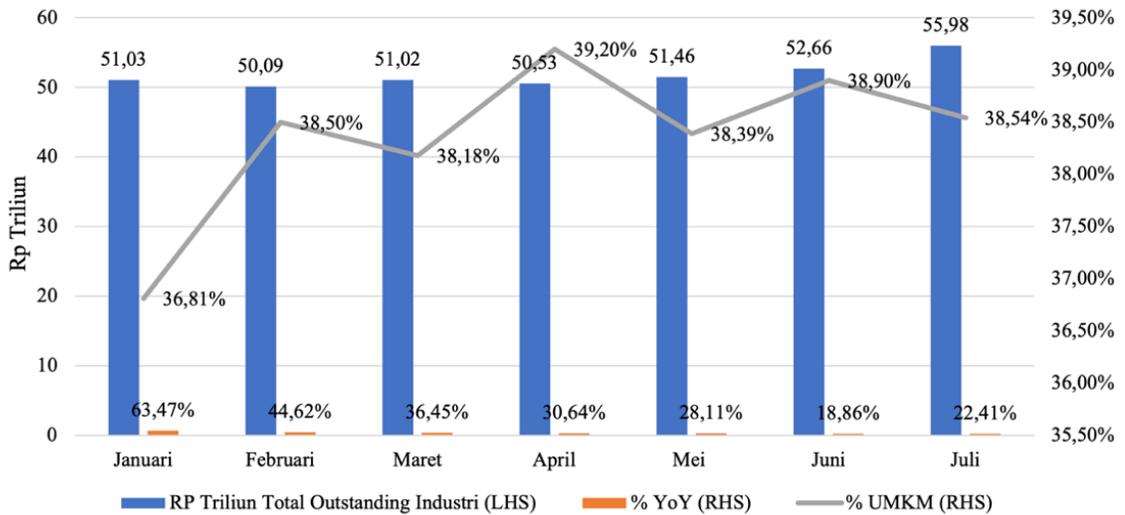
Keterbatasan akses ke pembiayaan formal mendorong pertumbuhan lembaga keuangan non-bank, seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM menjadi solusi potensial dalam memperluas akses keuangan bagi UMKM, namun banyaknya LKM yang belum memiliki badan hukum dan izin usaha menambah tantangan di bidang regulasi dan legalitas (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Di sisi lain, *fintech lending*, khususnya *Peer-to-Peer (P2P) lending*, telah muncul sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif. *P2P lending* menawarkan proses aplikasi yang cepat, bunga kompetitif, dan akses tanpa persyaratan agunan yang ketat, menjadikannya solusi yang lebih fleksibel bagi UMKM (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Peer-to-Peer (P2P) lending memfasilitasi pinjaman langsung antara investor dan peminjam melalui platform *online*, berbeda dengan mekanisme pinjaman bank tradisional yang melibatkan lembaga keuangan formal. *P2P lending* sering kali menargetkan peminjam dengan peringkat kredit rendah hingga menengah yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank sejak krisis keuangan global 2008. Pembiayaan ini menjadi alternatif yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan serta stabilitas UMKM (Yeo & Jun, 2020).

Pemerintah Indonesia juga berupaya meningkatkan proporsi pinjaman UMKM dari lembaga perbankan dari 20% menjadi 30% pada tahun 2024 untuk memperbaiki akses pembiayaan (Kementerian Keuangan RI Ditjen Perbendaharaan, 2022). Selain itu, regulasi yang diperkuat, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan peluncuran *Roadmap Fintech P2P Lending 2023-2028* oleh OJK, menunjukkan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, melindungi konsumen, serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam sektor *fintech lending* (Badan Kebijakan Fiskal, 2023).

Untuk menggambarkan kontribusi *fintech lending* terhadap sektor UMKM, data mengenai porsi pendanaan yang dialokasikan dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang peran industri ini. Pada akhir tahun 2023, total *outstanding* pendanaan dalam industri *P2P lending* menunjukkan bahwa sebagian besar pendanaan tersebut diarahkan kepada UMKM, mencerminkan skala operasi dan penetrasi *fintech* dalam mendukung

pertumbuhan sektor ini. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 yang memperlihatkan porsi *outstanding* pendanaan kepada UMKM tahun 2023.

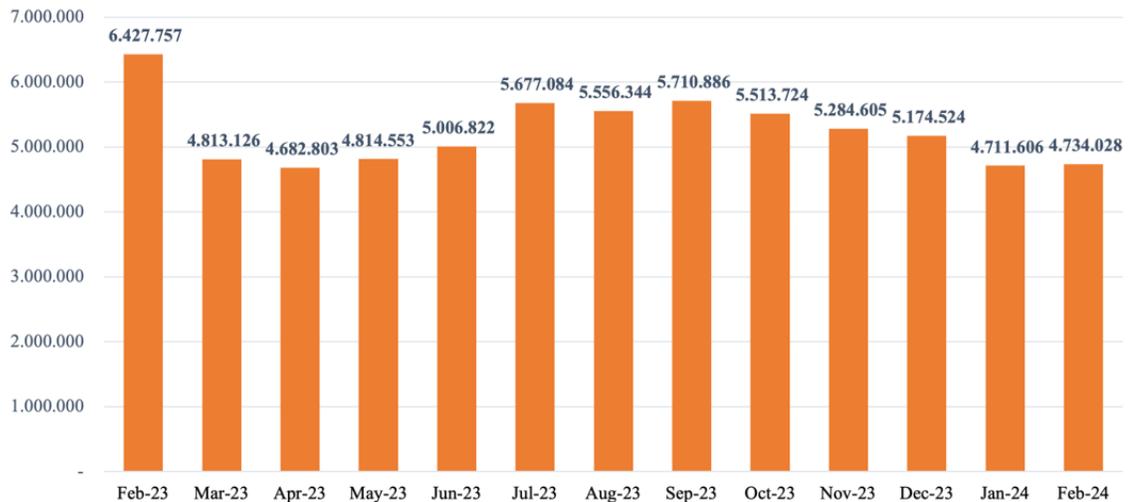


Gambar 1.1 Porsi *Outstanding* Pendanaan kepada UMKM 2023

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023a)

Total *outstanding* pendanaan dalam industri P2P *lending* mencerminkan skala operasi dan penetrasi industri dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM. Pada akhir 2023, total *outstanding* pembiayaan P2P *lending* mencapai Rp55,98 triliun, dengan Rp21,58 triliun atau 38,54% dialokasikan untuk UMKM, menunjukkan peran signifikan *fintech lending* dalam mendukung pertumbuhan UMKM (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Data jumlah rekening penerima pinjaman aktif melalui P2P *lending* di Jawa Barat sepanjang 2023 hingga 2024 memberikan gambaran mengenai dinamika penggunaan pinjaman *online* di daerah tersebut. Gambar 1.2 menunjukkan fluktuasi yang terjadi, mencerminkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi tren ini.

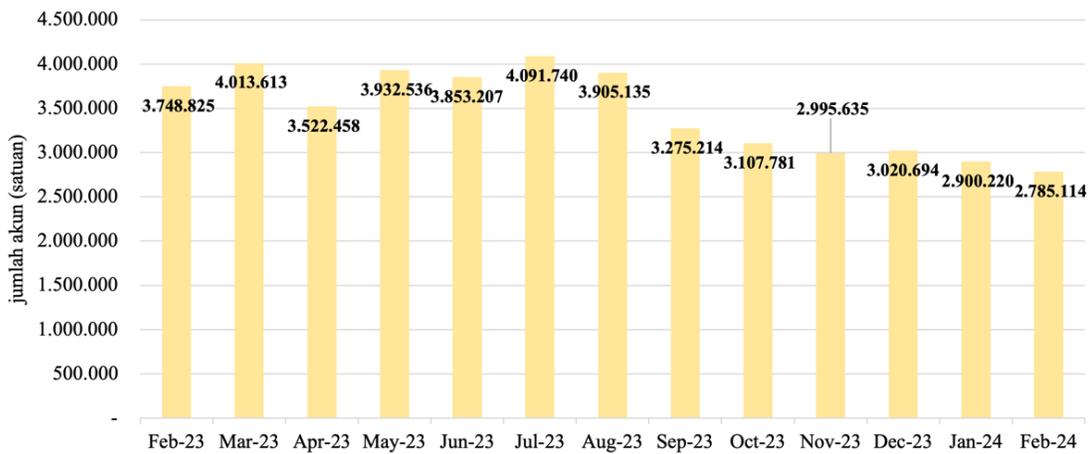


Gambar 1. 2 Jumlah Rekening Penerima Pinjaman Aktif (entitas) di Jawa Barat Februari 2023-2024

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2024a)

Fluktuasi jumlah rekening penerima pinjaman aktif di Jawa Barat pada periode 2023 hingga 2024 mencerminkan dinamika penggunaan pinjaman P2P *lending*, yang perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhinya. Pada Februari 2024, jumlah entitas penerima pinjaman menurun menjadi 4.734.028, dibandingkan dengan 6.427.757 entitas pada Februari 2023. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan perilaku pengguna (*Otoritas Jasa Keuangan, 2024a*).

Tren jumlah penerima pinjaman P2P di Jawa Barat dari Februari 2023 hingga Februari 2024 menunjukkan fluktuasi signifikan, dengan peningkatan awal tahun mencapai puncaknya pada Juli 2023 yaitu sebesar 4,091 juta sebelum mengalami penurunan hingga Februari 2024 sebesar 2,785 juta. Gambar 1.3 mengilustrasikan dinamika ini dan dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan P2P *lending* di wilayah Jawa Barat.



Gambar 1. 3 Jumlah Penerima Pinjaman (akun) di Jawa Barat Februari 2023-2024

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2024a)

Pembiayaan melalui P2P *lending* telah menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM, dengan memberikan akses yang lebih luas dan fleksibel ke modal. Penelitian oleh Syarifah (2019) menegaskan bahwa P2P *lending* secara signifikan meningkatkan produktivitas, pemasaran, dan profitabilitas UMKM, menunjukkan potensinya sebagai alternatif pembiayaan yang efektif di luar sistem keuangan tradisional. Penelitian yang dilakukan Candra et al. (2020) menjelaskan pentingnya meneliti variabel apa saja yang dapat menilai seberapa pengaruhnya adopsi dan penggunaan aplikasi *fintech lending*, diantaranya *perceived ease of*, *perceived usefulness*, dan *e-trust*. Studi ini menunjukkan bahwa dalam penerapan *fintech lending*, penting untuk tidak hanya meningkatkan kegunaan dan fungsionalitas sistem, namun juga fokus secara signifikan dalam membangun kepercayaan melalui langkah – langkah keamanan yang andal, praktik transparan, dan layanan pelanggan yang responsif. Hal ini akan membantu mengatasi hambatan dalam adopsi dan penggunaan, yang tidak semata – mata bergantung pada seberapa berguna atau mudahnya penggunaan aplikasi tersebut.

Pada tahun 2024, upaya memodernisasi UMKM difokuskan pada pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan keterampilan digital untuk bersaing di pasar digital. Strategi transformasi digital yang efektif menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja

UMKM. Meskipun berbagai kemajuan dapat dicapai, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam menerapkan teknologi dan mengembangkan kapasitas digital UMKM, yang dapat mempengaruhi keberhasilan transformasi digital mereka (Teng et al., 2022).

QRIS, yang dikembangkan oleh Bank Indonesia, menawarkan solusi pembayaran terpadu dengan biaya transaksi yang rendah—hanya 0,7% per transaksi, lebih murah dibandingkan biaya dari *e-wallet*. Hal ini memungkinkan UMKM mengurangi biaya operasional dan mempermudah penerimaan pembayaran dari berbagai sumber tanpa perlu sistem pembayaran yang terpisah (InterActive QRIS, 2024). Menurut Fahrudin & Isnaini (2023), QRIS menarik UMKM karena kemudahan dan kecepatan transaksi. Dengan menggunakan teknologi kode QR, QRIS menyederhanakan proses pembayaran, mengurangi waktu tunggu, dan menghindari potensi kesalahan yang sering terjadi pada metode konvensional. Keamanan transaksi juga meningkat dengan QRIS, karena risiko kehilangan uang tunai atau penipuan diminimalisir melalui sistem elektronik yang terukur.

Penggunaan QRIS memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi operasional UMKM, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan UMKM. Ini membantu UMKM untuk bersaing lebih baik dalam ekonomi digital dan memperkuat posisi mereka di pasar (Nursansiwati & Armiani, 2023). Penelitian oleh Djoyo et al. (2022) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan keamanan QRIS mempengaruhi kepercayaan pengguna dan niat mereka untuk menggunakannya, meskipun kemudahan penggunaan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepercayaan dan niat penggunaan QRIS.

Wardhani et al. (2023) menemukan bahwa adopsi QRIS berdampak positif pada kinerja finansial UMKM, dengan peningkatan dalam jumlah transaksi, omset penjualan, arus kas, dan pencatatan penjualan. Namun, beberapa pengusaha mikro masih menghadapi kendala seperti kurangnya pengetahuan tentang pendaftaran QRIS, kualitas jaringan yang buruk, biaya transaksi yang dapat mengurangi pendapatan, dan preferensi untuk transaksi tunai. Ini menunjukkan bahwa meskipun QRIS menawarkan

banyak kemudahan, masih ada hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan adopsi QRIS di kalangan UMKM.

Kinerja UMKM sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing di pasar. Studi yang dilakukan Harini et al. (2023) menunjukkan bahwa transformasi digital dan adopsi *E-commerce* menjadi salah satu pendorong utama peningkatan kinerja UMKM di Indonesia. Namun, kesiapan teknologi, dukungan manajemen puncak, dan tekanan kompetitif juga menjadi determinan penting yang mempengaruhi adopsi teknologi dan kinerja UMKM. Kombinasi keterampilan wirausaha dan adopsi teknologi terbukti dapat meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan, baik dari sisi operasional maupun pemasaran.

Pertumbuhan *E-commerce* di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif, dengan proyeksi nilai transaksi yang meningkat secara signifikan. Menurut data dari Kementerian Perdagangan RI (2024), nilai transaksi perdagangan digital di tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp533 triliun, naik dari Rp476 triliun di tahun sebelumnya, menandakan kenaikan yang substansial dalam sektor ini. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya *E-commerce* dalam perekonomian nasional dan telah memperkenalkan regulasi untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini berlangsung tanpa merugikan UMKM dan industri dalam negeri.

Dari perspektif regulasi, Kementerian Perdagangan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pertumbuhan *E-commerce* tidak merugikan UMKM dengan menerbitkan regulasi yang mendukung praktik bisnis yang adil dan kompetitif di antara semua pemain pasar. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mencakup aspek perizinan, periklanan, pembinaan, dan pengawasan bagi badan usaha, serta regulasi khusus terkait impor barang dengan harga di bawah standar minimum melalui *E-commerce* lintas negara.

Dalam konteks UMKM, transformasi bisnis melalui *E-commerce* memberikan peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya dan menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. *E-commerce* memungkinkan UMKM untuk beroperasi dengan lebih efisien, mengurangi biaya

operasional, dan meningkatkan akses ke pasar tanpa perlu memiliki toko fisik. Dengan demikian, *E-commerce* tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital secara keseluruhan tetapi juga memperkuat peran UMKM sebagai pilar penting dalam ekonomi Indonesia (Pusdiklat Keuangan Umum, 2019).

E-commerce kini menjadi saluran utama bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Studi dari Kosasi et al. (2019) menunjukkan bahwa faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan berperan penting dalam mendorong niat UMKM untuk menggunakan *E-commerce*. Sementara itu, Ausat & Peirisal (2021) menemukan hubungan signifikan antara faktor teknologi, organisasi, dan individu dengan tingkat adopsi *E-commerce* di kalangan UMKM. Penggunaan *E-commerce* ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kinerja UMKM. Teknologi, dalam hal ini, berperan sebagai pendorong utama yang memungkinkan UMKM mengelola operasional bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Teknologi juga membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas serta mengurangi biaya transaksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan Fitriharizki & Rahayu (2023) menunjukkan bahwa dukungan manajemen puncak, ukuran perusahaan, pelatihan karyawan, dan kesiapan penggunaan teknologi informasi merupakan faktor internal dan eksternal yang signifikan dalam determinasi adopsi *E-commerce* oleh UMKM. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam adopsi *E-commerce* merupakan langkah penting untuk meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM di pasar yang semakin global.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana ketiga inovasi keuangan digital seperti *Peer-to-Peer (P2P) lending*, QRIS, dan *E-commerce* mempengaruhi kinerja UMKM. Dengan memahami interaksi dan dampak dari inovasi-inovasi ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang akan membantu pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi yang efektif untuk memaksimalkan potensi UMKM di era digital, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini menjanjikan untuk

memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana digitalisasi keuangan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja UMKM.

Berdasarkan fakta yang tergambar sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan riset untuk menginvestigasi pengaruh *Peer-to-Peer* (P2P) *lending* dan QRIS melalui *E-commerce* terhadap kinerja UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia, mengingat peran penting P2P *lending* dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih fleksibel kepada UMKM, QRIS dan *E-commerce* sebagai fasilitator dalam menjalankan usaha.

1.3 Perumusan Masalah

Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang akan dijadikan fokus dalam penelitian ini diantaranya:

1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan *Peer-to-Peer* (P2P) *lending* terhadap kinerja UMKM?
2. Apakah terdapat pengaruh penggunaan QRIS terhadap kinerja UMKM?
3. Apakah terdapat pengaruh penggunaan *E-commerce* terhadap kinerja UMKM?
4. Apakah terdapat pengaruh penggunaan *Peer-to-Peer* (P2P) *lending* melalui *E-commerce* terhadap kinerja UMKM?
5. Apakah terdapat pengaruh penggunaan QRIS melalui *E-commerce* terhadap kinerja UMKM?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan *Peer-to-Peer* (P2P) *lending* terhadap kinerja UMKM.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan QRIS terhadap kinerja UMKM.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan *E-commerce* terhadap kinerja UMKM.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan *Peer-to-Peer (P2P) lending* melalui *E-commerce* terhadap kinerja UMKM.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan QRIS melalui *E-commerce* terhadap kinerja UMKM.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar efek lanjutan dari penelitian yang dilakukan dapat memberi manfaat atau kontribusi kepada pihak – pihak yang membutuhkan. Adapun aspek yang dapat secara spesifik dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan berharga dalam literatur dan referensi bagi peneliti yang berminat dalam bidang studi yang berkaitan dengan pengaruh P2P *lending* dan QRIS terhadap kinerja UMKM dengan *E-commerce* sebagai *variabel intervening*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif terkait dengan tema ini. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai interaksi antara fintech dan UMKM, membuka jalan bagi studi – studi selanjutnya yang mengkaji aspek – aspek spesifik dari teknologi keuangan dan *E-commerce*. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan teori – teori baru dalam bidang ekonomi digital dan manajemen UMKM, serta memberikan kerangka kerja teoritis untuk menguji variabel – variabel intervensi dalam konteks yang berbeda.

1.5.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi UMKM, regulator, dan pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini tidak hanya relevan untuk pengembangan strategi bisnis tetapi juga untuk pembuatan kebijakan yang mendukung integrasi teknologi digital dalam operasional UMKM, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Implikasi dari hasil penelitian juga perlu dipertimbangkan untuk pengembangan kebijakan dan

praktik terkait *P2P lending*, QRIS, dan *E-commerce* dalam mendukung pertumbuhan UMKM, diharapkan pihak – pihak terkait dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam mendukung perkembangan UMKM dan ekosistem keuangan yang inklusif.

Dengan hasil yang konkret, UMKM dapat lebih memahami cara mengoptimalkan penggunaan teknologi *P2P lending* dan QRIS untuk meningkatkan kinerja mereka. Ini juga dapat memotivasi regulator untuk merancang regulasi yang lebih mendukung perkembangan UMKM digital, dan mendukung pembuat kebijakan dalam menyusun strategi ekonomi mikro yang lebih efektif dan inklusif, khususnya dalam meningkatkan akses ke modal dan pasar melalui platform digital.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika pada penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Penggunaan *Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending* dan QRIS terhadap Kinerja UMKM dengan *E-Commerce* sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus UMKM di Kota Bandung)” untuk penulisan tugas akhir sendiri terdiri atas BAB I sampai dengan BAB V. Untuk memudahkan pembahasan, penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama dijelaskan secara umum dan ringkas terkait perkiraan dengan akurat isi penelitian. Bab ini terdiri atas Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab kedua berisi paparan secara umum yang berkaitan dengan penelitian serta teori – teori pendukung yang dilakukan guna memecahkan permasalahan yang terjadi pada penelitian sebelumnya sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas untuk pembuatan kerangka pemikiran penelitian yang didukung oleh hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga berkaitan dengan karakteristik penelitian, memperkuat metode atau pendekatan, alat pengumpulan data, urutan dalam melaksanakan penelitian, objek penelitian, pengumpulan data, alat pengukuran, dan teknik analisis data. Hal ini dilakukan dalam membantu menjawab permasalahan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menjelaskan tentang hasil penelitian dengan melakukan pengolahan data dan pengujian hipotesis dari data yang telah diperoleh. Metode serta pembahasan terkait hasil pengolahan data yang digunakan akan dibahas secara spesifik

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima menyajikan kesimpulan akhir dan tafsiran peneliti terhadap hasil penelitian sebagai jawaban dari perumusan masalah. Selain itu pada bab ini memberikan saran yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya.

Halaman ini sengaja dikosongkan